

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada Agustus 2024 terjadi kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Kudeta dan ketidakstabilan politik ini semakin memperburuk kondisi ekonomi Bangladesh membuat pemerintah sementara berupaya mendapatkan tambahan pinjaman untuk menstabilkan perekonomian Bangladesh (International Crisis Group, 2024). Tantangan ini yang menghambat pembangunan ekonomi negara Bangladesh. Ketidakpastian politik ini menggerus kepercayaan investor dan menunda implementasi berbagai proyek infrastruktur penting yang menjadi kunci pemulihan ekonomi. Selain itu, tekanan fiskal meningkat seiring dengan memburuknya kondisi sosial akibat inflasi dan meningkatnya angka pengangguran di sektor informal.

Pasokan energi di Bangladesh terbatas, dengan gas alam sebagai bahan bakar utama yang diperkirakan habis dalam 10-15 tahun ke depan jika tidak ditemukan cadangan baru, sementara negara ini bergantung pada impor minyak dan batu bara untuk memenuhi kebutuhan listrik dasar (Islam *et al.*, 2021, p. 1). Ketergantungan ini tidak hanya meningkatkan biaya energi tetapi juga menambah tekanan pada anggaran negara melalui subsidi energi sehingga beban hutang meningkat membuat pemerintah memerlukan tambahan dana. Pada 2021 hingga 2024, perekonomian Bangladesh melemah dengan pertumbuhan PDB riil turun dari 5,6% menjadi 4,5%, inflasi melonjak dari 6,9% ke 10,7%, pendapatan per kapita merosot dari \$2.730 (2022) ke \$2.620 (2024), sementara populasi mencapai 173,74 juta jiwa (IMF, 2024b). Meskipun populasi Bangladesh terus bertambah, indikator ekonomi utama seperti pertumbuhan PDB, inflasi, dan pendapatan per kapita menunjukkan tren negatif. Hal ini mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan yang efektif untuk mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi negara tersebut.

Menurut laporan VOA Indonesia, Sejak 2021 krisis ekonomi Bangladesh memburuk dengan cadangan devisa anjlok dari \$48 miliar menjadi di bawah \$20

miliar pada April 2024, akibat lonjakan biaya impor energi, pelemahan Taka, perlambatan ekspor garmen, dan defisit transaksi berjalan yang melebar (Mustafa, 2024). Peningkatan inflasi ini telah berdampak langsung pada daya beli masyarakat, memicu kenaikan harga pangan dan energi yang memperburuk ketidakstabilan sosial serta mendorong aksi protes terhadap kebijakan ekonomi pemerintah.

Di tengah krisis ekonomi Bangladesh, IMF kerap menjadi pilihan utama bagi negara berkembang untuk bantuan finansial melalui reformasi kebijakan dan program penyesuaian struktural guna menjaga stabilitas ekonomi. (Asshidiqy *et al.*, 2024, p. 205). Pendekatan IMF lebih bersifat bantuan teknis dan proyek sosial dengan dampak langsung pada masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Sebaliknya, New Development Bank (NDB) hadir sebagai alternatif yang berfokus pada pembiayaan proyek infrastruktur strategis dan pembangunan berkelanjutan dengan memprioritaskan pembangunan strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang seperti infrastruktur transportasi, dan energi (New Development Bank, 2023a). New Development Bank memberikan peluang bagi negara berkembang untuk membangun fondasi ekonomi yang stabil dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, sehingga melengkapi pendekatan lembaga tradisional yang lebih berorientasi pada stabilitas sosial dan makroekonomi.

Didirikan pada 2014 oleh negara-negara BRICS, New Development Bank hadir sebagai alternatif terhadap lembaga keuangan internasional tradisional seperti IMF dengan tujuan mendanai infrastruktur, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan mengurangi ketergantungan negara berkembang pada lembaga keuangan Barat. (Shetiya *et al.*, 2017, pp. 1–3). Dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan, energi bersih, dan infrastruktur hijau, NDB menawarkan pendekatan yang lebih relevan bagi negara-negara seperti Bangladesh. Bergabungnya Bangladesh dengan NDB pada 2021 menjadi bukti komitmen negara ini untuk memanfaatkan peluang kerja sama tersebut.

Dalam penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan IMF kurang efektif di negara berkembang karena persyaratan pinjaman yang ketat dan

kebijakan penyesuaian struktural yang sering tidak selaras dengan kebutuhan pembangunan lokal (Pamungkas *et al.*, 2019, pp. 147–148). Ketatnya persyaratan pinjaman juga cenderung memperburuk ketergantungan Bangladesh terhadap lembaga-lembaga tersebut. Persyaratan ini membatasi ruang geraknya dalam menciptakan solusi berkelanjutan, sementara dominasi negara-negara G-7 di IMF yang menguasai 45% suara dalam sistem persetujuan berbasis kepemilikan saham 85% semakin memperkuat kontrol negara kaya (Khadijah, 2014, p. 5). Hal ini mendorong Bangladesh untuk mencari alternatif yang lebih relevan dan fleksibel dalam memenuhi kebutuhan pendanaannya. BRICS melalui NDB sebagai sebuah aliansi ekonomi negara berkembang, muncul sebagai mitra strategis yang potensial.

Sejauh kebijakan distribusi dalam program IMF mencerminkan kepentingan pemegang saham utama dan stafnya, program ini membatasi respons pemerintah terhadap preferensi domestik, karena negara pemegang saham utama seperti AS dan G5 memiliki pengaruh besar dalam menentukan kebijakan IMF demi kepentingan politik dan ekonomi mereka sendiri (Lang, 2021, pp. 600–602). Kebijakan IMF lebih mencerminkan kepentingan pemegang saham utama, negara berkembang seperti Bangladesh sering kali menghadapi keterbatasan dalam merespons kebutuhan domestik mereka. Dominasi negara-negara besar dalam pengambilan keputusan IMF mendorong Bangladesh mencari alternatif seperti NDB yang menawarkan struktur lebih setara, sehingga memberikan lebih banyak suara dan fleksibilitas bagi negara berkembang dalam menentukan arah pembangunan mereka sendiri.

Negara-negara BRICS membentuk NDB sebagai respons terhadap keterbatasan bank pembangunan multilateral seperti IMF dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur mereka, dengan menerapkan tata kelola berbasis konsensus, hak suara setara bagi semua anggota pendiri, serta kepemimpinan bergilir untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih representatif untuk menghindari dominasi satu negara (Hofman *et al.*, 2024, p. 452). Pendekatan ini memberikan alternatif yang lebih adil bagi negara berkembang seperti Bangladesh, yang sering kali menghadapi ketimpangan dalam akses pendanaan

global, sehingga memungkinkan mereka memperoleh dukungan finansial tanpa tekanan kebijakan dari negara-negara besar.

Model ini muncul sebagai tanggapan atas ketidakpuasan pemerintah BRICS dan negara berkembang lainnya terhadap proses penunjukan eksekutif utama lembaga keuangan global yang ada, di mana negara-negara maju tertentu memiliki hak untuk menominasikan warganya sendiri untuk posisi tersebut. Sebagai contoh, kepemimpinan dalam lembaga keuangan global cenderung didominasi oleh negara-negara tertentu, di mana Direktur Pelaksana IMF selalu berasal dari Eropa, Presiden Bank Dunia berasal dari Amerika Serikat, dan Presiden Bank Pembangunan Asia berasal dari Jepang (Hofman *et al.*, 2024, p. 452). Untuk mengatasi ketimpangan ini, negara-negara BRICS mengadopsi model kepemimpinan yang lebih representatif dalam pemilihan manajemen senior NDB.

Bangladesh menjadi negara pertama di luar BRICS yang bergabung dengan NDB sebagai anggota peminjam pada 2021, didorong oleh faktor geopolitik dan diplomasi, terutama dukungan kuat dari India, China, dan Rusia dalam proses akses yang dimulai pada 2020. Sebagai bagian dari keanggotaannya, Bangladesh menyetujui kontribusi modal sebesar USD 942 juta untuk memperoleh 1,84% hak suara, yang lebih besar dibandingkan di lembaga keuangan tradisional, meskipun tetap lebih kecil dibandingkan anggota pendiri (Chin *et al.*, 2024, pp. 415–416). Keputusan Bangladesh untuk bergabung dengan NDB mencerminkan upaya diversifikasi sumber pendanaan agar tidak bergantung pada lembaga keuangan Barat, sekaligus memperkuat posisinya dalam kerja sama ekonomi global yang lebih inklusif.

Bergabungnya Bangladesh dalam keanggotaan NDB pada 2021 didasari oleh beberapa alasan (Chin *et al.*, 2024, p. 421);

1. Kebutuhan pembiayaan infrastruktur: Mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketergantungan pada lembaga keuangan multilateral tertentu
2. Strategi transisi ekonomi: Memanfaatkan akses ke pembiayaan murah sebelum beralih dari negara kurang berkembang menjadi negara berpendapatan menengah pada 2026

3. Diversifikasi sumber pendanaan: Memperluas opsi pembiayaan di tengah meningkatnya biaya pinjaman dari lembaga tradisional.

Pendekatan tradisional lembaga keuangan seperti IMF yang cenderung membantu melalui reformasi struktural dan kebijakan fiskal ketat, sering kali meninggalkan kebutuhan kritis negara berkembang yang berakar pada isu-isu yang lebih berkelanjutan. Kesenjangan ini mencakup kurangnya perhatian terhadap permasalahan masyarakat yang terjadi di Bangladesh, pemberdayaan komunitas lokal, dan keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, New Development Bank (NDB) menawarkan pendekatan yang berbeda dengan prioritas pada pembangunan infrastruktur dan proyek berkelanjutan yang relevan dengan kebutuhan lokal. Namun, sejauh mana NDB dapat menjadi alternatif yang efisien dan efektif dibandingkan IMF masih belum banyak diteliti. Hal ini penting untuk dipahami karena negara berkembang memerlukan model keuangan yang tidak hanya mendukung stabilitas ekonomi, tetapi juga mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana NDB dapat menjadi alternatif yang strategis bagi Bangladesh dibandingkan IMF dalam menghadapi krisis ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut: Mengapa Bangladesh lebih memilih bekerja sama dengan New Development Bank sebagai alternatif dibandingkan dengan IMF dalam menghadapi krisis ekonomi?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Menganalisis efisiensi dan efektivitas New Development Bank (NDB) sebagai alternatif strategis bagi negara berkembang dibandingkan dengan IMF dalam menghadapi krisis ekonomi.
- 1.3.2 Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pendekatan pendanaan NDB dan IMF dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
- 1.3.3 Memberikan rekomendasi strategis bagi negara berkembang, khususnya Bangladesh, untuk memanfaatkan potensi NDB sebagai mitra

keuangan yang relevan.

1.4 Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoretis

1. Memperkaya literatur tentang pendekatan IMF dan NDB dalam mendukung pembangunan negara berkembang.
2. Berkontribusi pada pengembangan kajian Hubungan Internasional dengan menyoroti peran lembaga keuangan internasional dalam dinamika pembangunan negara berkembang.
3. Memenuhi salah satu syarat kelulusan program Sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta.

B. Manfaat Praktis

1. Memberikan bahan kajian dan referensi tambahan bagi akademisi untuk memahami peran IMF dan NDB dalam pembangunan negara berkembang, serta membuka peluang penelitian lanjutan mengenai dinamika ekonomi-politik internasional.
2. Memberikan rekomendasi strategis untuk memanfaatkan IMF dan NDB secara optimal, baik sebagai mitra yang saling melengkapi maupun sebagai alternatif, guna mendukung stabilitas ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan yang mendasari penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus utama kajian, tujuan dan manfaat yang ingin dicapai melalui penelitian, serta sistematika penulisan sebagai panduan bagi pembaca dalam memahami alur keseluruhan skripsi.

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Rumusan Masalah
- 1.3.Tujuan Penelitian
- 1.4.Manfaat Penelitian
- 1.5.Sistematika Penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teori yang mendukung analisis dalam penelitian, pembahasan terhadap penelitian terdahulu yang relevan sebagai bentuk pemetaan ilmiah, serta kerangka berpikir yang menjadi fondasi konseptual dalam merumuskan arah analisis.

- 2.1. Landasan Teori
- 2.2. Penelitian Terdahulu
- 2.3. Kerangka Berpikir

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi jenis penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan untuk memperoleh hasil yang valid dan sesuai dengan tujuan penelitian.

- 3.1. Jenis Penelitian
- 3.2. Teknik Pengumpulan Data
- 3.3 Teknik Analisis Data

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang menyajikan pembahasan secara mendalam terhadap hasil penelitian. Penulis menganalisis temuan-temuan yang ada, mengaitkannya dengan teori yang digunakan, serta menjawab rumusan masalah secara sistematis.

- 4.1 Kondisi Ekonomi Bangladesh dan Peran IMF
- 4.2 Alternatif Pembiayaan: Peran NDB dalam Ekonomi Bangladesh
- 4.3 Alasan Bangladesh Lebih Memilih Kerja Sama dengan NDB dalam Menyelesaikan Krisis di Bangladesh
- 4.4 Kritik Terhadap New Development Bank

BAB V: PENUTUP

Bab terakhir ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat menjadi rujukan untuk penelitian lebih lanjut atau pertimbangan dalam praktik kebijakan. Penulis merangkum inti dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan menegaskan kontribusi dari penelitian ini.

- 5.1 Kesimpulan